

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan usaha kecil dalam perekonomian nasional sangat penting. Hal ini terbukti dari data BPS tahun 1996, yang menunjukkan bahwa usaha kecil berjumlah 38,9 juta. Mereka tersebar di berbagai sektor dan menyerap tenaga kerja cukup besar yang diperkirakan sekitar 84%. Data BPS tersebut menunjukkan bahwa usaha kecil mendominasi jumlah usaha nasional. Akan tetapi, walaupun jumlahnya mendominasi usaha nasional, perannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 38,85% (Biro Pusat Statistik, 1996). Kenyataan ini masih jauh dari sosok pengusaha kecil yang diharapkan sebagai pendorong kemajuan perekonomian nasional. Belum optimalnya peran pengusaha kecil, menandakan pembinaan pengusaha kecil selama ini hanya menerima tetesan (*trickle down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil. Tentu saja situasi ini membuat pengembangan pengusaha kecil menjadi sangat rentan. Mereka hanya berposisi sebagai sektor subordinat dan membuat pengusaha kecil tidak pernah besar.

Kenyataan tersebut disebabkan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang ditempuh selama ini hanya mengacu pada pertumbuhan (*growth*) dan pengelolaan ekonomi nasional hanya dipercayakan kepada sekelompok orang atau para konglomerat sebagai *engine of growth*, sementara sektor usaha kecil menempati posisi marginal. Akan tetapi

pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia ternyata sektor usaha kecil menjadi penyelamat perekonomian Indonesia, mereka umumnya bisa bertahan dan tidak turut memperparah keadaan ekonomi nasional.

Krisis moneter dan ekonomi yang diikuti krisis politik yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 telah memberikan pelajaran berharga bahwa pendekatan yang dipilih dalam pembangunan perlu diperkaya dengan upaya mengokohkan keberdayaan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang menempatkan dan memberikan kesempatan masyarakat sebagai aktor utama yang menjalankan gerakan pembangunan dikenal sebagai pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*). Pendekatan pemberdayaan diyakini sebagai prasyarat utama menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional, meskipun pendidikan bukan segala-galanya tetapi merupakan satu-satunya alat untuk mengembangkan sumber daya manusia termasuk pembangunan perekonomian bangsa (Surakhmad, 1986). Untuk itu, pendidikan merupakan alat utama dalam membangun penguatan pribadi dan masyarakat sehingga memiliki keberdayaan diri untuk mengambil alih tanggung jawab pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan tersebut. Pada waktu krisis ekonomi tersebut juga terbukti bahwa sektor usaha kecil dan menengah adalah yang paling tangguh. Mereka terbukti masih bisa berjalan dan memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal sebaliknya justru terjadi pada sektor usaha besar yang mengalami kemacetan dan bahkan kebangkrutan.

Kenyataan tersebut bukan berarti usaha kecil tidak luput dari permasalahan dan kendala, seperti kendala pengembangan usaha, akses permodalan dan pasar. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pengusaha kecil. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi usaha kecil dalam pengembangan usahanya, meliputi: (1) adanya berbagai kecenderungan dan tantangan dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan, (2) kendala utama yang merupakan kendala internal pengusaha kecil adalah tingkat kemampuan, keterampilan dan keahlian sumber daya manusia (SDM) yang umumnya masih rendah, (3) kendala eksternal, menyangkut iklim berusaha yang kurang kondusif, prasarana dan sarana, serta pola pembinaan yang kurang terpadu.

Di samping kendala tersebut di atas terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kecil di masa mendatang, seperti : Adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan tuntutan dari masyarakat untuk membangun sistem ekonomi yang demokratis yang berdasarkan atas azas kekeluargaan, pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menirabulkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah membina dan mengembangkan berbagai jenis pusat sumber belajar masyarakat (*community learning center*) yang secara khusus dirancang untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran di bidang kewirausahaan. Lembaga penyedia peluang belajar dan atau penyedia layanan belajar kewirausahaan itu ada yang berdiri sendiri

sebagai sebuah unit kelembagaan, ada pula yang berada di bawah dan koordinasi suatu lembaga induk. Lembaga induk yang memprakarsai dan membina pusat sumber belajar bagi pengembangan usaha kecil itu ada yang berbentuk departemen (kementerian), lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan lain seperti pondok pesantren, yayasan sosial, partai politik, dan asosiasi profesi.

Untuk kepentingan pengembangan pengusaha kecil dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang memadai, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (Depkop dan PKM) pada tahun 1997/1998 merintis berdirinya sebuah pusat belajar dengan misi menyemaikan dan mengembangkan kemampuan pengusaha kecil dan menengah dengan nama kelembagaan: Klinik Konsultasi Bisnis (KKB). Secara konseptual Klinik Konsultasi Bisnis Depkop dan PKM (1998: 3) adalah suatu lembaga yang mengembangkan usaha potensial masyarakat menjadi usaha menengah melalui serangkaian pembinaan terpadu yang meliputi kegiatan identifikasi, konsultasi, advokasi yang disertai oleh kegiatan pendukung lainnya seperti magang, studi banding, pelatihan, pameran, temu usaha, dan kemitraan.

Dari penjelasan tersebut di atas, tampak bahwa pemberdayaan pengusaha kecil ini menggunakan strategi inovatif dalam bentuk satu lembaga baru yang melibatkan para konsultan dari berbagai latar belakang baik pakar (akademisi) maupun praktisi yang secara khusus memberikan layanan informasi dalam bentuk pelatihan, bimbingan baik secara individual melalui

konsultasi di luar pelatihan, maupun secara kelompok dalam permasalahan usaha kecil.

Pada awal perkembangannya, untuk seluruh Indonesia berdiri lebih dari 33 KKB. Untuk satu wilayah propinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa timur, didirikan 2 unit KKB, yaitu di Surabaya dan di Malang. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, didirikan satu unit KKB yang berkedudukan di Bandung. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat ini aktivitas KKB-KKB tersebut telah banyak yang pasif.

Berdasarkan pengamatan sekilas, dapat diidentifikasi adanya satu penyebab umum kemacetan aktivitas KKB, yaitu kurang konsistennya pengurus (pengelola) terhadap misi awal KKB untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah. KKB sebagai suatu institusi pendidikan, idealnya harus mampu melakukan proses edukasi dalam bentuk pembelajaran, pelatihan dan bimbingan. Dalam hal ini, KKB yang ideal adalah yang mampu berperan sebagai wadah proses edukasi, media dan proses sosialisasi inovasi, dan transformasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Sesuai dengan UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan terdiri atas kegiatan berisikan, yaitu: pengajaran, bimbingan dan pelatihan. Kegiatan pelatihan dan bimbingan merupakan inti proses pendidikan di KKB. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya peningkatan mutu pendidikan di KKB. Di samping itu, kegiatan pembelajaran yang bermutu adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada keaktifan dan kemandirian peserta

didik atau warga belajar. Warga belajar perlu melakukan pengamatan, merumuskan dugaan awal, melakukan percobaan pengujian, menarik kesimpulan dari percobaannya, melaporkan hasil temuannya secara langsung (otentik) dengan bimbingan sumber belajar (konsultan) yang aktif pula bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Kegiatan belajar mengajar seperti ini disebut dengan Kegiatan Belajar Mengajar Aktif (KBMA).

Sehubungan dengan itu untuk mendukung terwujudnya suasana kegiatan pembelajaran seperti hal tersebut, sedikitnya ada tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh pengelola lembaga KKB, atau pusat sumber belajar pada umumnya, yaitu: *Pertama*, mampu bertindak sebagai fasilitator belajar (*learning facilitator*) program pelatihan dan bimbingan dengan tugas-tugas: mengidentifikasi kebutuhan dan sumber belajar pelatihan, merancang bahan latihan, menerapkan berbagai strategi dan teknik latihan yang relevan, menggunakan alat dan media latihan, membangun suasana latihan yang kondusif, melaksanakan interaksi latihan yang efektif, dan melakukan evaluasi hasil latihan, serta menguasai konsep, teori, dan prinsip pembelajaran orang dewasa dan siap untuk diterapkan. *Kedua*, mampu bertindak sebagai perancang (*programmer*) program latihan dan bimbingan dengan tugas-tugas: mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan latihan, menggali dan menganalisis sumber-sumber pendukung dan penghambat program latihan dan bimbingan, merencanakan desain program, merancang strategi penyelenggaraan program, menyusun desain evaluasi, melaksanakan pelatihan dan bimbingan, menyiapkan pelatih dan pembimbing, meramalkan

kebutuhan-kebutuhan latihan dan solusi permasalahan masa depan, menguasai landasan-landasan berpikir tentang pembelajaran, pelatihan, bimbingan, psikologi belajar orang dewasa, serta menguasai konteks sosial budaya dan implikasinya terhadap program latihan dan bimbingan. *Ketiga*, mampu bertindak sebagai pengelola (*manager*) satuan lembaga latihan dengan tugas-tugas: merancang dan mengembangkan program latihan, mengorganisasi program pelatihan, memfasilitasi program latihan, melaksanakan dan mengendalikan program latihan, mengevaluasi program latihan; serta dengan menguasai konsep atau landasan berpikir tentang latihan, bimbingan, pengembangan sumber daya manusia, dan konsep pembelajaran orang dewasa.

Sumber belajar insani di KKB, khususnya para konsultan harus memiliki karakteristik dan kemampuan profesional yang harus dikembangkan, yaitu: (1) menguasai program pembelajaran; (2) menguasai bahan latihan dan konteks bimbingan tertentu; (3) terampil menggunakan multimedia dan multiteknik pembelajaran; (4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya; dan (5) memiliki kedisiplinan. Tiga karakteristik pertama dapat dikelompokkan sebagai penguasaan kemampuan kepelatihan, sementara karakteristik keempat dan kelima berkenaan dengan visi, sikap dan kepribadian pelatih.

Konsultan di KKB bertugas bukan hanya sebagai pelatih, melainkan juga sebagai pembimbing. Konsultan harus dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam rangka keberhasilan kegiatan pendidikan



bertal didik. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang tidak profesional. Oleh karena itu, seorang konsultan KKB yang profesional harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas kependidikannya. Konsultan tidak mungkin meminta tolong kepada nonkonsultan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Konsultan yang profesional adalah yang memiliki kedisiplinan dan komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Dalam kaitan ini akan penting dikutip pemikiran Ginanjar Kartasasmita (1996) yang antara lain menyatakan bahwa keberhasilan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunannya, sementara keberhasilan pembangunan itu sendiri banyak ditentukan oleh hasil kerja para konsultan.

KKB sebagai satu bentuk satuan Pendidikan Luar Sekolah merupakan proses pemberdayaan yang bukan sekadar proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan, melainkan lebih menekankan pada upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk mengatasi (memecahkan) masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi di lapangan. Pelatihan dan bimbingan di KKB sebagai proses pemberdayaan juga menekankan pada kemampuan kritis masyarakat dalam menganalisis setiap situasi ekonomi yang dihadapinya dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupannya (Kindervatter, 1979: 12).

Pimpinan (direktur) KKB adalah *master trainer* yang harus memiliki kemampuan yang komprehensif, sebagai agen perubahan sosial lewat media

pendidikan. Oleh karena itu, pengelola harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi segala sumber daya yang ada di lingkungannya demi kelangsungan kegiatan pendidikan yang efektif dan efisien. Namun demikian, pimpinan KKB juga merupakan *head teachers*. Oleh karena itu, direktur KKB harus mampu membantu para instruktur atau nara sumber mengembangkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan pendidikan. Ia tidak hanya dituntut menguasai keterampilan manajerial, tetapi juga keterampilan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan.

Kegiatan pendidikan yang bermutu di KKB, tentu membutuhkan ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap dan bermutu. Oleh karena itu diperlukan: (1) sistem produksi dan pengiriman sarana belajar yang memungkinkan lembaga dapat mengakses dalam kondisi yang baik dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan; (2) perawatan semua sarana belajar yang tertib, seperti diinventarisasi dan dirawat, sehingga keberadaannya senantiasa dalam kondisi yang siap pakai; (3) pemanfaatan (pendayagunaan) sarana belajar yang ada oleh instruktur dan warga belajar dalam setiap kegiatan pembelajaran; (4) pengembangan minat belajar sehingga tercipta budaya belajar yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu.

Namun sayang sekali, seperti telah dikemukakan bahwa tidak semua pusat sumber belajar di bidang kewirausahaan dapat menciptakan suasana belajar berkelanjutan dan menghadirkan kebutuhan belajar yang terus-menerus seiring dengan perkembangan dan permasalahan usaha para klien.



Banyak pusat sumber belajar di jalur pendidikan luar sekolah yang membina kewirausahaan bekerja atas nama program atau proyek pesanan dari pemerintah. Begitu proyek berakhir dan pemberian dana kegiatan dari pemerintah berakhir, maka berakhir pula program kegiatan pembelajaran yang diselenggarakannya. Pada sisi lain terdapat sebuah prinsip bahwa sebuah satuan PLS akan terus hidup berkelanjutan bila program belajar yang diselenggarakannya memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pusat sumber belajar masyarakat (*community learning center*) di jalur PLS sesungguhnya mengikuti hukum pasar: "di mana ada kebutuhan belajar, di situ program belajar harus diselenggarakan". Tanpa distimulasi dengan dana pemerintah pun, bila memang masyarakat membutuhkan program belajar yang ditawarkan pusat sumber belajar itu, maka masyarakat akan datang dengan sendirinya dan bersedia membayar harga pembelajaran dan pelatihan yang ditetapkan.

Permasalahan besar yang perlu dipikirkan sesungguhnya adalah bagaimana membangun pusat pembelajaran masyarakat yang benar-benar kompatibel atau mampu memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang selalu berubah-ubah ke arah perkembangan, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan bimbingan yang mampu mengembangkan dan mengikuti kebutuhan belajar khalayak sasarannya. Tema inilah yang ingin dikaji melalui penelitian ini.

Salah satu KKB yang berupaya membina dan mengembangkan pengusaha kecil adalah KKB Jawa Barat. Masalahnya adalah bagaimana

sosok model pelatihan dan bimbingan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan usaha kecil melalui KKB, peluang dan kendala apa yang akan dihadapi dalam menerapkan model pelatihan dan bimbingan tersebut, bagaimana menguji efektivitas model pendidikan tersebut. Permasalahan tersebut, merupakan titik awal yang akan dikaji-kembangkan penelitian ini. Dengan harapan jika model ini dapat diaplikasikan, maka usaha kecil dapat memberi sumbangan terhadap peningkatan kemampuannya dalam produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung dalam memperkuat struktur perekonomian nasional, sehingga pengusaha kecil itu mampu bersaing pada era perdagangan bebas baik di dalam AFTA tahun 2003 maupun dalam APEC tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian diarahkan untuk mengkaji lebih jauh tentang model pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan bagi peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan akan dijadikan model alternatif dalam rangka pengembangan lembaga sejenis yang akan memegang misi dalam pemberdayaan usaha kecil yang merupakan salah satu aset utama perekonomian nasional.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Selama ini pelatihan dan bimbingan kewirausahaan yang dilaksanakan lembaga pelatihan dan bimbingan termasuk KKB belum mampu melahirkan wirausahawan tangguh, karena pelaksanaannya masih bersifat rutin, dan

belum mampu memenuhi semua kebutuhan pendidikan pengusaha kecil yang cukup beragam dan setiap saat berkembang, termasuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil baik yang bersifat ekonomis maupun sosial. Hal ini dapat dikaji dari segi layanan pokok dan kegiatan pendukung KKB meliputi: identifikasi, layanan informasi, konsultasi dan pelatihan dalam bidang pemasaran, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, manajemen dan organisasi. Sedangkan kegiatan pendukung meliputi magang, studi banding, pameran, temu usaha, dan kemitraan.

KKB Jawa Barat dalam memasuki tahun ketujuh dari sejak berdirinya tahun 1997, telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan pengusaha kecil, akan tetapi untuk mengoptimalkan perannya perlu mencari pola-pola ideal yang lebih efektif sebagai lembaga pembina pengusaha kecil. Oleh karena itu permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "*Bagaimanakah model pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan pengusaha kecil ?*"

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, lebih lanjut dijabarkan beberapa sub-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah program pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan KKB sebagai upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil ?
2. Bagaimanakah daya dukungan pengembangan kelembagaan KKB dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan bagi upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil ?

3. Bagaimanakah rumusan model konseptual pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan yang dilaksanakan KKB sebagai upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil ?
4. Bagaimanakah memvalidasi model konseptual pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan yang dilaksanakan KKB dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha kecil ?
5. Bagaimanakah mengimplementasikan model pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan di KKB dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha kecil ?
6. Bagaimanakah mengevaluasi efektivitas model pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan terhadap pengusaha kecil di KKB ?

C. Batasan Istilah

Perlu ada klarifikasi terhadap beberapa konsep yang terkait dengan tema penelitian ini. Klarifikasi dilakukan dengan memberikan batasan yang jelas terhadap setiap istilah (kata atau frasa). Batasan itu diperlukan agar setiap konsep yang digunakan dalam penelitian ini memiliki arti yang khusus dan tidak bermakna ganda, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan pemaknaan. Oleh karena itu, pemaknaan istilah yang dikembangkan di sini adalah yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan. Beberapa konsep tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Model

Model dapat diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. (Abdulkhak, 200:11). Dalam penelitian ini, yang dimaksud model adalah acuan pendidikan kewirausahaan dan strategi pembelajaran yang dihasilkan dan merupakan produk akhir dari sebuah penelitian. Model kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewirausahaan ini akan ditawarkan kepada lembaga-lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan pemerintah dalam rangka mengembangkan kader-kader wirausahawan baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan baik tua maupun muda, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

2. Pelatihan

Mockijat (1989:184) mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan penyesuaian atau pemberian pengaruh kepada seorang pegawai untuk meningkatkan kecakapannya guna suatu kegiatan tertentu. Arti sepenuhnya tentang pelatihan adalah lebih banyak daripada sekadar 'pengajaran, yang berhubungan dengan pemberian pengetahuan, karena pelatihan mencakup baik pengalaman mengerjakan suatu pekerjaan maupun pengajaran.'

Unsur-unsur pelatihan: (1) perencanaan yang disengaja, (2) tujuan yang hendak dicapai (3) kegiatan latihan dan bimbingan, (4) isi belajar dan berlatih menekankan pada keahlian atau ketrampilan, (5) peserta didik, (6) dilaksanakan dalam waktu relatif singkat pada suatu tempat latihan dan bimbingan. Tujuan pelatihan adalah untuk memperbaiki dan memperkembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari para karyawan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan (Nitisemito, 1982: 86).

Asas-asas umum pelatihan menurut Yoder, (1962: 235) adalah: (1) *individual differences*, (2) *relation to job analysis*, (3) *motivation*, (4) *active participation*, (5) *selection of trainers*, (6) *selective of trainers*, (7) *trainers training*, (8) *training methods*, (9) *principles of learning*. Pelatihan merupakan fasilitator bagi peserta pelatihan. Menurut Bonnie J. Cain dan John P. Comins (1977: 8) peran pelatih adalah: (1) memaksimalkan partisipasi para peserta pelatihan, (2) membantu peserta pelatihan melihat seluruh masalahnya dalam proses pengambilan keputusan, dan (3) memberikan keahlian teknis yang dibutuhkan peserta pelatihan dalam memproduksi bahan belajar. Istilah pelatihan dalam penelitian ini adalah pemberian pengetahuan dan keterampilan kejuruan kewirausahaan yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi bagi pengusaha kecil baik laki-laki maupun perempuan.

3. Bimbingan

Istilah bimbingan dalam studi ini juga meliputi konseling, yang dalam dimensi bisnis diartikan sebagai kegiatan membantu klien menyangkut suatu problem atau keprihatinan penting dalam mencapai kemampuan guna dapat menangani hal tersebut secara efektif (The Asia Foundation, 1997: II-8). Istilah bimbingan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada konsep konseling atau bersifat klinik yang diartikan sebagai hubungan di mana seseorang berupaya membantu yang lainnya untuk memahami dan memecahkan permasalahannya. Dalam hal ini adalah suatu usaha dari pihak lembaga pelatihan untuk membantu peserta secara perseorangan agar dalam menghadapi masalah yang berhubungan kegiatan usahanya secara optimal dapat dicapai penyelesaian yang selanjutnya akan meningkatkan pencapaian hasil yang maksimal (Atmodiwirio, 2002: 196).

Bimbingan berarti membantu klien untuk merasa yakin dalam menempatkan dan menggunakan informasi yang relevan untuk mempermudah menggali dan mempertimbangkan di antara pilihan yang ada, mengembangkan rencana, serta membuat keputusan penting dalam upaya mencapai sasaran yang dikehendaki di masa mendatang. Agar terjalin hubungan yang efektif, maka konsultan bisnis harus mempunyai pandangan positif yang mutlak terhadap klien dan mendekati klien tanpa beban penilaian. Konseling dan konsultasi merupakan kegiatan yang erat hubungannya, konseling (bimbingan) umumnya memanfaatkan kemampuan klien untuk belajar dari penasihat bisnisnya guna menerapkan pengetahuan ini dalam

memecahkan masalahnya. Menurut The Asia Foundation (1997: 11-8) ada tiga fungsi bimbingan, yaitu: mengikuti klien, menggali dan memberi respon terhadap problem, dan mengerti persoalan.

4. Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan

Pelatihan yang dilanjutkan dengan bimbingan kewirausahaan kepada UKM dan calon UKM, yang berlangsung secara bersiklus dan berkelanjutan. Artinya setiap kesempatan pelatihan yang terkait dengan kegiatan usahanya, UKM binaan yang pernah ikut pelatihan dan atau bimbingan dapat diikutkan kembali dalam hal ini termasuk akses pasar dan informasi yang bersifat inovatif yang berpeluang mengembangkan usahanya. Setiap UKM binaan memiliki file data/grafik yang tersimpan di KKB, demikian pula diantara mereka diberikan profil singkat sesama binaan KKB.

5. Kewirausahaan

Konsep wirausaha adalah terjemahan dari kata *entrepreneur* yang dalam bahasa Indonesia diartikan dari dua suku kata, yaitu: *wira* artinya: *utama, gagah, luhur, berani, teladan*; dan *usaha* artinya: *kegiatan, hekerja*. Istilah wirausaha dapat diartikan sebagai kegiatan utama yang dilaksanakan dengan penuh keluhuran, keberanian dan keteladanan. Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya dan mempunyai tindakan yang tepat

guna memastikan kesuksesan. Kewirausahaan adalah sifat wirausaha berupa perilaku manusia dalam fungsi ekonomi yang berorientasi produksi atau distribusi di sektor swasta dan wirausaha yang ditandai oleh kemandirian, motivasi tinggi, kejujuran, penuh perhitungan, dan keberanian mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya serta tidak mengabaikan nilai-nilai normatif.

Pendidikan kewirausahaan adalah upaya sadar bagi pembentukan kepribadian manusia untuk memiliki nilai-nilai sebagai wirausahawan, yaitu kepribadian yang mengandung nilai-nilai mandiri, pemberani, kreatif, disiplin, ulet, bermotivasi tinggi, jujur, penuh perhitungan, dan tahu akan risiko. Dalam konsep pendidikan kewirausahaan ini tercakup masalah-masalah nilai, konsep, sistem, lingkungan, dan iklim sosial yang ada di sekitarnya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud pendidikan kewirausahaan adalah pendidikan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengusaha kecil sebagai warga belajar.

6. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowering*. Pemberdayaan adalah perihal memberi kuasa atau wewenang kepada seseorang atau kelompok orang. Julian Rappaport menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dipandang sebagai suatu proses atau mekanisme yang digunakan oleh manusia, organisasi, dan masyarakat untuk memperoleh 'kuasa' atas

kehidupannya sendiri. Kaitannya dengan konsep Pendidikan Luar Sekolah, Kindervatter (1979: 13) mendefinisikan pemberdayaan sebagai *people gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political forces in order to improve their standing in society*. Konsep pemberdayaan dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan pengusaha kecil terhadap perkembangan kegiatan ekonomi atau usaha, dan pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupan ekonominya serta kehidupan masyarakat secara umum.

7. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah anggota masyarakat yang melakukan suatu kegiatan wirausaha dalam skala kecil. Adapun karakteristik usaha kecil dalam penelitian ini merujuk pada UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu: (1) omzet pertahun maksimal satu milyar rupiah, (2) aset maksimal 200 juta rupiah, (3) milik WNI, (4) berdiri sendiri, bukan cabang atau anak perusahaan.

Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi (1998: 5), membuat kriteria pengusaha kecil yang potensial untuk berkembang, yakni: (a) pengusaha kecil potensial dan mempunyai motivasi untuk berkembang menjadi pengusaha menengah, (b) pengusaha kecil mandiri yang mempunyai omzet Rp 100 juta s/d Rp 700 juta per tahun, (c) berbentuk perusahaan formal yang mempunyai tenaga kerja tetap, (d) memiliki semangat dan jiwa

kewirausahaan yang tinggi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan serta jangkauan pasar yang cukup luas. (e) perusahaan yang telah berdiri sekurang-kurangnya 1 tahun, dan (f) diutamakan pengusaha kecil yang mempunyai jenis kegiatan unggulan di daerah tersebut.

8. Klinik Konsultasi Bisnis (KKB)

Pengertian Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) adalah suatu lembaga yang mengembangkan usaha potensial masyarakat menjadi usaha yang mandiri dan menengah melalui serangkaian pembinaan terpadu yang meliputi kegiatan identifikasi, konsultasi, dan advokasi yang disertai oleh kegiatan pendukung lainnya seperti magang, studi banding, pelatihan, pameran, temu usaha, kemitraan dan sebagainya (Ditjen PPK, 1998: 3). Secara operasional KKB diartikan sebagai suatu wahana pembinaan pengusaha kecil agar menjadi mandiri, tangguh dan menengah melalui layanan pokok berupa konsultasi dan pelatihan secara terpadu dalam bidang pemasaran, permodalan, SDM, teknologi, manajemen dan organisasi usaha kecil, disertai layanan pendukung berupa magang, studi banding, pelatihan, pameran, temu usaha, dan kemitraan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan mengembangkan sebuah model pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan



kemampuan pengusaha kecil melalui lembaga KKB. Pengembangan model yang diinginkan itu dilakukan dengan melakukan penelitian deskriptif terhadap model yang telah ada di KKB Jabar, melakukan kajian dan evaluasi kritis, melakukan modifikasi komponensial, melakukan ujicoba, validasi, dan penghalusan sehingga siap didesiminasikan. Model tersebut mengharapkan output pendidikan pada lembaga KKB menjadi mitra berkelanjutan seiring dengan perkembangan kebutuhan belajarnya sehingga terus tumbuh sebagai pengusaha menengah atau besar yang berbasis kemampuan kewirausahaan. Di sisi lain, model ini juga bermaksud menunjukkan dan mensosialisasikan pemikiran dan konsep pusat sumber belajar yang benar-benar kompatibel dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan belajar khalayak sasaran potensialnya. Artinya, tidak sekadar menyelenggarakan program-program latihan dan bimbingan yang bersifat musiman dan bergantung pada proyek pemerintah.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang:

- a. Program-program pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan KKB sebagai upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil.
- b. Daya dukungan pengembangan kelembagaan KKB dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan bagi upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil.
- c. Rumusan model konseptual pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan yang dilaksanakan KKB sebagai upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil.

- d. Cara memvalidasi model konseptual pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan yang dilaksanakan KKB dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha kecil.
- e. Proses implementasi model pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan di KKB dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha kecil.
- f. Evaluasi efektivitas model pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan terhadap pengusaha kecil di KKB.

2. Kegunaan Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik bagi kepentingan praktis maupun bagi kepentingan pengembangan konsep teoretis. Untuk kepentingan praktis, temuan penelitian ini sangat berguna bagi pengembangan model pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dalam upaya menumbuhkan budaya wirausaha yang menjadi hajat dan perhatian banyak kalangan. studi ini pun dapat memberikan rekomendasi melalui data empiris terhadap perbaikan performansi sistem pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pusat sumber belajar masyarakat di bidang kewirausahaan, dan pengembangan usaha skala kecil. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi pendidikan luar sekolah dalam memperjelas dan mempertegas konsep-konsep ilmiah yang telah ada mengenai konsep pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok usaha kecil.

Kegunaan praktis lainnya adalah bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan masukan pada pemegang kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah, khususnya bagi pihak departemen terkait yang membina dan berurusan dengan pendidikan, pengembangan usaha kecil, dan pengembangan sumberdaya manusia. Pemerintah, dalam hal ini khususnya pihak Depdiknas, Depnaker, dan Depkop & PKM beserta dinas terkait di propinsi dan kabupaten/kota, dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai masukan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan di wilayah masing-masing. Lembaga pelatihan dan bimbingan kewirausahaan di berbagai dinas, instansi, dan lembaga sosial dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai masukan dalam mengembangkan dan mengelola proses pelatihan dan bimbingan kewirausahaan kepada pengusaha kecil. Secara normatif, penelitian ini selaras dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan perekonomian nasional dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan dapat dirancang berdasarkan hasil kajian empirik terhadap penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan bimbingan berkelanjutan yang ideal sehingga dapat meningkatkan usaha kecil menjadi usaha mandiri dan menengah.

Secara teoretik temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian pendidikan luar sekolah, khususnya untuk penguatan komponen dasar manajemen pusat sumber belajar masyarakat bidang pengembangan kewirausahaan, yaitu pengelolaan KKB. Dengan

demikian, diharapkan studi ini juga akan memperluas wawasan kajian komponen sistem pembelajaran pada lembaga pelatihan. Diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi (masukan) bagi telaah, kajian, dan pengembangan praktek pendidikan luar sekolah, khususnya pada satuan pendidikan berbentuk Diklat Kewirausahaan dalam wadah KKB. Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh masukan bagi pengembangan wawasan tentang pendidikan kewirausahaan pada rakyat kecil melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

E. Paradigma Penelitian ✓

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya mengembangkan suatu model pelatihan dan bimbingan kewirausahaan berkelanjutan pada KKB Jawa Barat. Komponen model, meliputi delapan sub-komponen:

Pertama, usaha kecil dengan berbagai jenis usaha, termasuk calon wirausaha yang memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha kecil.

Kedua, sarana dan prasarana pembelajaran, seperti: bahan belajar dalam bentuk modul, media pembelajaran, metode pembelajaran (individual, dan kelompok), teknik pembelajaran (demonstrasi, diskusi, dan karyawisata).

Ketiga, konsultan dan sumber belajar berasal dari berbagai latar belakang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), akademisi, usaha kecil, dan manajer KKB sendiri.

Keempat. manajemen, meliputi langkah-langkah: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan yang dilakukan oleh manajer KKB bekerja sama dengan konsultan.

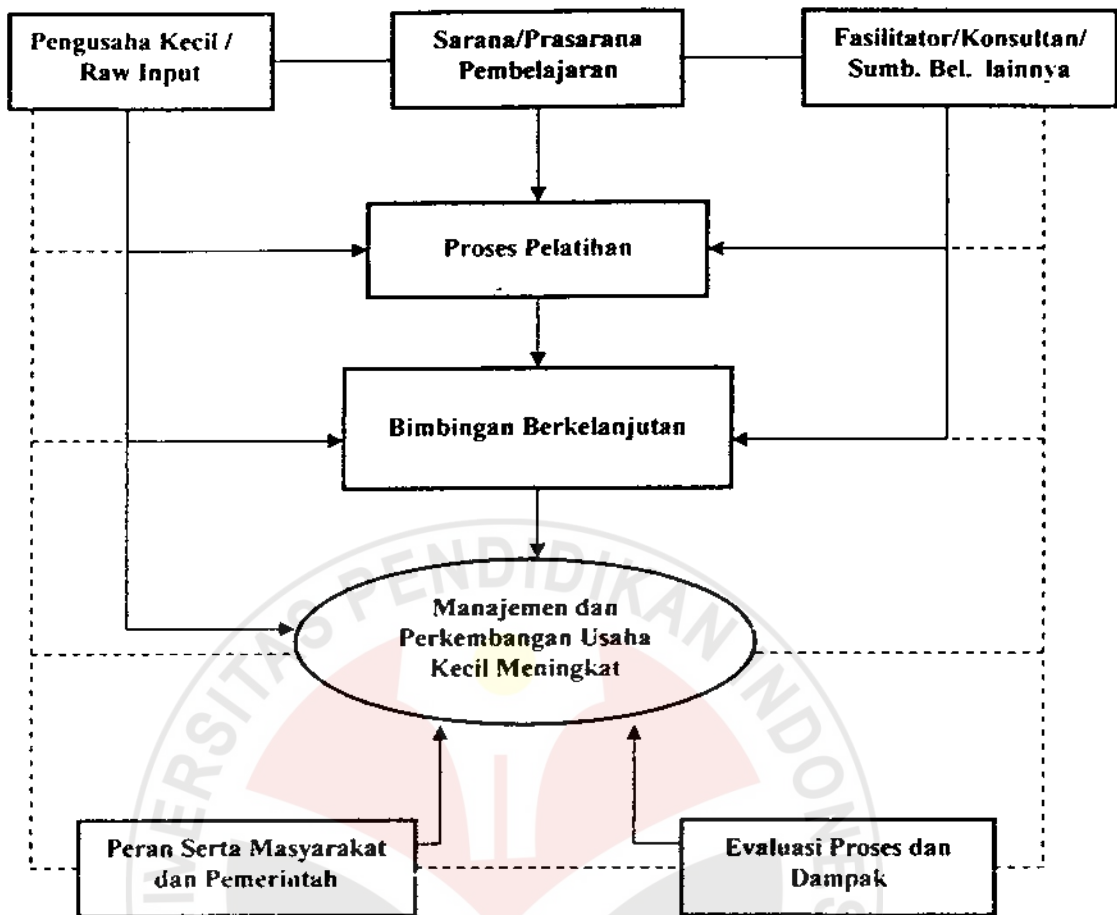
Kelima. partisipasi masyarakat meliputi: keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan, bantuan fasilitas pembelajaran, bantuan biaya pelatihan dan pengembangan usaha kecil mitra binaan.

Keenam. proses pelatihan yang berlangsung setelah melalui tahap: identifikasi kebutuhan organisasi, identifikasi kebutuhan belajar usaha kecil, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun program pembelajaran, memilih strategi pembelajaran, menentukan sumber belajar yang relevan dengan program pembelajaran, melaksanakan pelatihan dan dilanjutkan dengan bimbingan.

Ketujuh. kegiatan pelatihan dan bimbingan diikuti dengan evaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitas model, kemudian dilakukan revisi untuk kemudian diujicobakan lagi, kemudian terakhir dilakukan evaluasi.

Kedelapan. berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi model konseptual, akan dihasilkan model fungsional yang siap diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas.

Kedelapan komponen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, dan dijadikan sebagai paradigma penelitian yang dapat dilihat pada gambar dalam bentuk bagan berikut ini.



Gambar 1.1: Paradigma Penelitian